

**TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
(Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)

OLEH

ELISYAPITRI YANI HARAHAHAP

NIM: 23.14.3.002



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M / 1440 H

**TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
(Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Oleh:

ELISYAPITRI YANI HARAHAHAP
NIM.23.14.3.002

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. M. Iqbal Irfham, M.Ag.
NIP. 19711224 200003 1 001

PEMBIMBING II



Adlin Budhiawan, SH.M.Hum
NIP.19820510 200901 1 014

Mengetahui:

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan



Fatimah, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

IKHTISAR

Judul skripsi ini berjudul Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat). Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-undang No.6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa salah satu dari tugas kepala desa adalah Menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, Melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan Memberdayakan masyarakat desa. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai landasan hukum program pemberdayaan masyarakat, analisis program pemberdayaan dan implementasinya serta analisis faktor penunjang dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisisnya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat) bahwa pemberdayaan yang dilakukan kepala desa sudah berjalan namun tidak semua berhasil, sedangkan faktor penjunjang dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai faktor penunjang yaitu: keturunan, kewibawaan dan kekuasaan sedangkan faktor penghambat yaitu kondisi penduduk dan partisipasi masyarakat.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya, sehingga dengan segala petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam penulis persembahkan kepada buah hati Ibunda Aminah Sang pemimpin ummat ialah Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang syafaatnya juga yang diharapkan pada hari akhir kelak.

Dalam memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka penulis menyusun skripsi dengan Judul **TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kec. Besitang Kab. Langkat)**

Sebagai mahasiswa, sepanjang proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesusahan dalam berfikir dan ragu-ragu dalam tindakan, namun berkat doa, semangat dan dorongan dari berbagai pihak, karenanya dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dalam bentuk ucapan

yang sederhana kepada semua pihak yang turut berpartisipasi atas selesainya skripsi ini.

Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Panusunan Harahap serta Ibunda tersayang Hotna Batubara yang telah melahirkan, mendidik dan membimbing penulis selama ini. Semoga pencapaian ini sebagai tanda bahwa penulis menjadi anak shaleh dan berbakti kepada beliau walaupun usaha ini jauh dari kata maksimal.

Serta ucapan terima kasih dari penulis yang begitu besar kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Irham, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam mengadakan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Ucapan senada juga penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta penasehat akademik, kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Ibu Fatimah, M.A. selaku Ketua Jurusan Siyasah, kepada Bapak Zaid Al-Fauzah, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah yang telah banyak membantu penulis. Semoga kebaikan dan kebahagiaan senantiasa mengelilingi. Dan begitu juga halnya kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah begitu banyak

membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis, semoga ilmu pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan menjadi alat untuk mencapai surga kelak.

Dan ucapan terima kasih yang sangat tulus kepada seluruh keluarga tercinta, kepada kakak Nurhaidah Harahap, S.kep, Muhammad Ridwan Harahap, S.E, adinda tersayang Minasari Harahap S.H, Siti Nurhaliza Harahap dan Deliana Putri Harahap. Dan ucapan senada juga penulis ucapkan kepada Bobby Irawan, S.Pd serta yang tersayang Nur Afifah Khairiyah.

Ucapan terima kasih yang sangat mendalam juga kepada sahabat tercinta Asriah Ulina Bacin, S.H, Nurzannah Z, Junita Kurnia Rahma Nst, S.H, Elvi Junisa S.H, Faridah Hanum, S.H, Umami Sa'adah, Muhammad Saleh Nst, S.Pd, Edy Sanjaya Sitepu, S.H, Febri Syahputra, S.H, Faisal Hariadi Hasibuan dan kepada teman-teman jurusan Siyasah stambuk 2014.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun segi analisa dan sistematika pembahasan. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi-Nya. Amin.

Medan, 7 Agustus 2019

Penulis

Elisyapitri Yani Harahap

NIM. 23.14.3.002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

IKHTISAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Pembatasan masala	11
C. Pembatasan istilah	12
D. Perumusan masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Hipotesa	16
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika PenulisaN.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pemerintahan Desa Menurut Perundang-Undanga.....	22
1. Desa dan Kepala Desa	22
2. Tugas dan Fungsi Kepala Desa	25
3. Wewenang Kepala Desa	26
4. Hak Dan Kewajiban Kepala Desa	27
5. Pemberdayaan Masyarakat.....	30
B. Konsep Kepemimpinan dalam Islam	39
1. Kepemimpinan	39
a. Khilafah	40
b. Imamah	40
c. Imarah	42
1. Tugas dan Fungsi Pemimpin	43
2. Wewenang Pemimpin.....	47
3. Hak dan Kewajiban Pemimpin	48
4. Pemberdayaan Masyarakat.....	51

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tempat	53
1. Sejarah Singkat	53
2. Letak Geografis	55
3. Kondisi Demografis	57
B. Penduduk.....	61
1. Agama	61
2. Pendidikan	64
3. Pekerjaan	67
4. Sosial dan Budaya	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peraturan Hukum Program Pemberdayaan Masyarakat.....	71
B. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasiya	79
C. Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur lingkungannya sendiri, juga memiliki wewenang

dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa serta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna menjalankan hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.¹

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun

¹ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), h. 30.

pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. Guna mewujudkan masyarakat yang demokratis dan tanggap akan pemerintahan di negaranya,²

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun tugas kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam

² Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Bandung:PT Remaja Rosdakary,1995), h.25.

Pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang yaitu: Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, memanfaatkan teknologi tepat guna serta mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam struktur organisasi, peran seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang mutlak karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat pula digambarkan sebagai hubungan patron-client (patronase), yaitu hubungan antara bapak dan anak.

Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-anak harus patuh kepada bapaknya sebagai pemimpin.³

Menurut al-Mawardi, yang dimaksud seorang pemimpin adalah apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya dengan penuh keadilan.⁴ Keadilan harus dipegang pemimpin, hal ini disebabkan pemimpin sebagaimana yang dikenal dalam Islam adalah seorang Khalifah yang mengatur ummat sebagai pengganti Rasulullah Saw. Dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu. Menurut al-Zamakhsari dan al-Qurthubi, Abd Muis Sali menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan amanat yang telah diberikan kepadanya dan sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya.⁵

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya fikir serta tindakan lebih baik dari sebelumnya.

³ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h.191.

⁴ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 276 (pen), cet ke-IV.

⁵ Abd Muis Salim, *Figih Siyasah Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta :PT. Rajawali Grafindo Persada), cet. Ke-III, h. 223.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Prinsipnya diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diarahkan kepada muara yang relatif sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan “daya” agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa agar masyarakat sasaran dapat diposisikan terlibat aktif dalam proses pembangunan.⁶

Kerangka berpikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan. Ketiga, upaya melindungi (protect) terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

⁶ Wisnu Indrajit VO dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Jakarta:Intrans Publising, 2014), h.43.

Pemberdayaan dengan menekankan kepada ketiga ketentuan tersebut diyakini merupakan strategi jitu dalam menekan angka kemiskinan.⁷

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang Pembangunan Desa pada pasal 5 program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa meliputi: Pertama, pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar yakni: Lingkungan pemukiman, Transportasi, Energi, Informasi dan komunikasi. Kedua, pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan prasarana dasar untuk kebutuhan yakni: Kesehatan masyarakat, Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan prasarana ekonomi

⁷ *Ibd*, h.44.

untuk mewujudkan lembung ekonomi desa yakni: usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi berkala produktif meliputi aspek produksi distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desadan produksi unggulan pedesaan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada pasal 7 yang di prioritaskan meliputi: Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan pembangunan desa. Kedua, pengembangan kerja sama antar desa denga pihak ketiga. Ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Desa Suka Jaya adalah salah satu pemekaran dari dua desa yaitu desa Salah Haji dan desa Halaban, terjadinya pemekaran pada tahun 1997 yang di

pimpin oleh bapak (alm) Musa Yusmi dari desa Salah Haji dan desa Halaban (alm) Abdurrahman syahputra, maka disebutlah desa Suka Jaya.

Secara georafis gampong Seumatang Keude memiliki batas-batas dengan Gampong yang lain, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jawa kecamatan Kejuruan Muda, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Halaban kecamatan kejuruan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa salah Haji dan P. Siata kecamatan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seumadam kecamatan Kejuruan Muda.

Secara Demografi jumlah penduduk Desa Suka Jaya secara umum terdiri dari beberapa suku seperti Jawa, Batak, Karo, Aceh, Melayu dengan jumlah 2599 jiwa.

Desa Suka Jaya merupakan desa terpencil yang berada di perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh, Jarak tempuh dari desa Juka Jaya ke Kecamatan membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh 36,00 km, dan jarak tempuh dari desa Suka Jaya ke Kabupaten 72, 00 km dengan waktu sekitar 3 jam menggunakan kendaraan bermotor.

Menurut observasi yang peneliti lakukan infrastruktur di desa Suka Jaya tidak memadai, seperti jalanan menuju desa suka jaya belum teraspal dengan kondisi jalan yang masih bertanah kuning dan bercampur dengan batu. Ketika

hujan turun maka jalanan tersebut akan terpenahi dengan genangan air sehingga jalanan tersebut menjadi berlumpur dan licin. Dengan kondisi jalan tersebut mengakibatkan, masyarakat yang mengendarai sepeda motor banyak yang terjatuh sehingga aktivitas masyarakat menjadi terhambat.

Infrastruktur lainnya seperti Lampu penerangan jalan tidak ada sehingga pada malam hari jalanan didesa suka jaya gelap gulita sehingga mengakibatkan aktivitas warga pada malam hari menjadi terhambat, Sumber daya manusia yang rendah ini dikarenakan masyarakat selalu bergantung dengan pemerintahan desa sehingga masyarakatnya tidak menjadi mandiri. Dan tempat ibadah yang kurang seperti Masjid dari lima dusun yang ada di desa Suka Jaya hanya ada dua masjid yang tersedia disana.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. Disamping itu kepala desa mengemban fungsinya antara lain: menggerakkan partisipasi masyarakat, kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, melaksanakan tugas dari pemerintahan diatasnya, keamanan dan ketertiban masyarakatnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemerintah diatasnya

Agar tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik maka bagi seorang Kepala Desa harus memiliki gaya tersendiri agar masyarakat ikut serta membantu kelancaran dari pembangunan. Bagi seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tidak terlalu memaksakan kemauan sendiri. Keikutsertaan masyarakat Desa Suka Jaya dalam menyukseskan program pembangunan sangat diharapkan, dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam pembangunan desa keharmonisan yang dicita-citakan dapat tercapai. Oleh karena permasalahan-permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti bagaimana Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Fiqih Siyasah di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Menurut observasi yang peneliti lakukan infrastruktur di desa Suka Jaya tidak memadai, seperti jalanan menuju desa suka jaya belum teraspal dengan kondisi jalan yang masih bertanah kuning dan bercampur dengan batu. Ketika hujan turun maka jalanan tersebut akan terenuhi dengan genangan air sehingga jalanan tersebut

menjadi berlumpur dan licin. Dengan kondisi jalan tersebut mengakibatkan, masyarakat yang mengendarai sepeda motor banyak yang terjatuh sehingga aktivitas masyarakat menjadi terhambat.

Infrastruktur lainnya seperti Lampu penerangan jalan tidak ada sehingga pada malam hari jalanan didesa suka jaya gelap gulita sehingga mengakibatkan aktivitas warga pada malam hari menjadi terhambat, Sumber daya manusia yang rendah ini dikarenakan masyarakat selalu bergantung dengan pemerintahan desa sehingga masyarakatnya tidak menjadi mandiri . Dan tempat ibadah yang kurang seperti Masjid dari lima dusun yang ada di desa Suka Jaya hanya ada dua masjid yang tersedia disana.

C. Batasan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah : Tugas Kepala Desa Suka Jaya dalam Pemberdayakan masyarakat Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 serta bagaimana peraturan hukum terhadap program pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor penunjang dan penghambat Kepala Desa dalam pemberdayakan masyarakat.

D. Rerumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peraturan hukum program pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana analisis program pemberdayaan masyarakat dan implementasinya yang dilakukan kepala desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat?
3. Apakah faktor penunjang dan penghambat kepala desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dalam pemberdayaan masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan hukum terhadap program pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui program pemberdayaan masyarakat dan Implementasinya yang dilakukan kepala desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat kepala desa Suka Jaya kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dalam pemberdayaan masyarakat.

F. Kegunan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis yaitu berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca tentang tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

G. Kerangka pemikiran

Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Seorang pemimpin adalah juga seorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukannya untuk memimpin.

Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional.

Setiap pemimpin mempunyai cara atau gaya dalam memimpin organisasinya. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk memengaruhi bawahannya. Secara relatif ada tiga macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokrasi, demokratis, atau partisipatif, dan laissez-faire, yang semuanya pasti mempunyai kelemahan-kelemahan dan keunggulannya. Perbedaan gaya kepemimpinan dalam organisasi akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada partisipasi individu dan perilaku kelompok.

Kepemimpinan pada dasarnya merupakan amanah, yang mana seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Seorang hendaknya membiasakan diri berlaku adil, baik terhadap dirinya, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, teman-temannya, tetangganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, maupun terhadap sang khalik (Allah swt). Apabila keadilan itu ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, tentu keamanan, ketentraman, kedamaian, serta kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan akhirat akan dapat diraih.

H. Hipotesa

Dalam sebuah penelitian hipotesa merupakan jawaban sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjaga pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam penelitian ini, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai.

Salah satu kewajiban pemimpin menurut imam al-mawardi adalah mensejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan, Hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang mutlak karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat pula digambarkan sebagai hubungan patronclient (patronase), yaitu hubungan antara bapak dan anak. Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-anak harus patuh kepada bapaknya sebagai pemimpin.

Akan tetapi penulis melihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa suka jaya dan sebagian masyarakat menganggap bahwa yang dilakukan kepala desa belum seutuhnya menyentuh masyarakat, sehingga antara kepala desa dan masyarakat terjadi kesenjangan sehingga program program yang di jalankan kepala desa belum sepenuhnya tercapai.

Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwasanya kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin seperti kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.

I. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisanya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul.⁸ Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Reneka Cipta, 2012), h.24.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁹ Dimana semata-mata melukiskan keadaan objek atau menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa, dimana peneliti memberikan gambaran tentang Tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah di Desa Suka Jaya Kec. Besitang Kab. Langkat)

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian pada Skripsi ini yaitu di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan jenis penelitian diantaranya yaitu field research (penelitian lapangan). penulis mengadakan jenis penelitian dengan mendatangi langsung ke

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h.10.

tempat penelitiannya yaitu Desa Suka Jaya agar memperoleh data yang lengkap dan akurat. Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat dan Undang-Undang Desa.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh melalui dari pencatatan, dari Kantor Kepala Desa serta pemimpin informal yang diambil dari pemimpin Kadus dan lembaga-lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, serta buku-buku penunjang penelitian.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Menjadi subjek penelitian adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, pimpinan informal yang diambil dari Kadus yang berjumlah 5 Dusun. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Analisis Fiqih Siyasah di Desa Suka Jaya Kec. Besitang Kab. Langkat).

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan, khususnya dalam masalah kepemimpinan Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
- b. Wawancara, yaitu wawancara diarahkan kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat..

J. Sistematika Penulisan

Sebagai rincian mengenai penulisan ini, penulis nantinya akan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk skripsi dengan membagi kepada 5 (lima) bab. Dan dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Membahas: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Membahas: Desa dan kepala desa, tugas dan fungsi kepala desa, wewenang kepala desa, hak dan kewajiban kepala desa, pemberdayaan masyarakat, konsep kepemimpinan dalam islam, kepemimpinan, tugas dan fungsi pemimpin, wewenang pemimpin, hak dan kewajiban pemimpin, serta pemberdayaan masyarakat.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berisikan tinjauan lokasi penelitian yang menguraikan , sejarah singkat letak geografis, kondisi demografis, penduduk, agama, pendidikan, pekerjaan dan sosial dan budaya di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Membahas: Landasan hukum program pemberdayaan masyarakat, analisis program pemberdayaan masyarakat dan implementasi yang dilakukan kepala desa suka jaya kecamatan besitang kabupaten langkat, serta faktor penunjang dan penghambat kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Membahas: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang

1. Desa dan Kepala Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.¹⁰ Desa di Indonesia pada hakekatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.192.

¹¹ Sadu wasistiona, Irwan Tahir, *Adminitrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 69.

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu,

Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak)

Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan).¹²

Bayu Suriningrat berpendapat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.¹³

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa ia mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

¹² Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghali Indonesi Vvca, 1986), h. 30.

¹³ Suwani, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur," *Istilah: Jurnal Fisip, Adminitrasi Negara* 2016, h. 2237.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ia dibantu oleh pamong desa.

2. Tugas dan Fungsi kepala Desa

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Sedangkan tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.¹⁵

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur 4 (empat) tugas utama Kepala Desa yaitu: Menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, Melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan Memberdayakan masyarakat desa. Adapun

¹⁴ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 38.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 902.

fungsi kepala desa adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Pada ayat (3) disebutkan, fungsi kepala desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

3. Wewenang Kepala Desa

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hak kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁶

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;

¹⁶ *Ibid*, h. 987.

- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertib an masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perokonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan

untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat.¹⁷ Sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh dengan tanggung jawab serta tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral.¹⁸

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Kepala desa berkewajiban antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

¹⁷ *Ibid, h. 298.*

¹⁸ *Ibid, h. 421.*

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan seterusnya.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) yaitu upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah di miliki masyarakat.¹⁹ Berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan.²⁰ Dalam KBBI pemberdayaan secara *etimologis* berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber-menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/ melakukan sesuatu.²¹

Menurut Korten pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas sumber daya manusia

¹⁹ John m. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT gramedia Jakarta, 1976), h. 211.

²⁰ *Ibid*, h. 441.

²¹ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 192.

baik material maupun non-material melalui redistribusi modal.²² Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Desa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari keleparan, bebas dari kebodohan, bebas dari

²² Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip, dan*, (Bandung : Ossa Promo,1999), h. 263.

kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²³

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan antara lain: Pertama, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Ketiga, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Keempat, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi,

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 57-58.

dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.²⁴

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer dari penelitiannya, yaitu: Pertama, perkembangan konsep diri yang lebih positif. Kedua, kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis. Ketiga, sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Dengan demikian konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional. Lebih lanjut Kartasmita, mengemukakan bahwa upaya memberdayakan

²⁴ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Lembaga Studi Pembangunan STKS), h. 210-224.

rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:²⁵ Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja serta

²⁵ Ginanjar kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Cides.1995), h. 95.

pasar. Ketiga, memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise ada lima macam, yaitu: pertama, pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua, partisipasi (*participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. Ketiga, konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. Keempat, keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal,

regional dan nasional. Kelima, keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

Pada dasarnya pemberdayaan tujuan utamanya adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki kemampuan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi : pertama, kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. Kedua, kelompok lemah khusus,

seperti manula, anak-anak dan remaja. Ketiga, kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari “keumuman” kerap kali dipandang sebagai “*deviant*” (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.²⁶

Pihak pemberdaya harus mempunyai komitmen untuk membuat atau melakukan suatu program yang juga memberdayakan. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa banyak program pembangunan dalam pelaksanaannya kurang atau bahkan tidak mencerminkan aspek pemberdayaan. Hal ini tidak sesuai dengan pemberdayaan yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada masyarakat. Komitmen yang rendah dari pihak pemberdaya dapat saja

²⁶ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spectrum Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Lembaga Studi Pembangunan STKS), h. 60.

muncul dari kekhawatiran bahwa dengan upaya pemberdayaan akan mengurangi kekuatan dan kekuasaan mereka.²⁷ Lebih lanjut dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa prinsip, antara lain: pertama, mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama. Kedua, Akibat artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/ puas atau tidak senang/ kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ pemberdayaan di masa-masa mendatang. Ketiga, asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatan dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya.²⁸

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam

²⁷ Ginanjar Kertasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta, 1996), h. 144.

²⁸ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 105.

rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya.

B. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi *inter-personal*).

Istilah Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khilafah, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk* dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu Khilafah, imamah dan imarah.²⁹ Oleh karena itu, pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh ketiga istilah ini.

²⁹ Ketiga istilah ini merupakan bentuk kata yang menyatakan perihal dalam memimpin, sedangkan bentuk kata yang menunjuk pada pelakunya adalah *khalifah*, *imam* dan *amr*.

a. *Khilafah*

Kata *khilafah* berasal dari kata *khalafa-yakhlifu-khalfun* yang berarti *al-'aud* atau *al-balad* yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut khalifah dengan bentuk jamak *khulafa'* yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.³⁰ Kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang memberi wewenang. Menurut al-Ragib al-Asfahani, arti “menggantikan yang lain” yang dikandung kata *khalifah* berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik orang yang digantikannya itu bersamanya atau tidak.

b. *Imamah*

Imamah berasal dari kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *alqasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). *Imamah* di sini berarti perihal memimpin. Sedangkan kata *imam* merupakan bentuk ism fa'il yang

³⁰ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang: Indonesiatara, 2001), h. 30.

berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah a'immah.³¹ Imam juga berarti bangunan benang yang diletakkan di atas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. Dalam al-Qur'an, kata imam dapat berarti orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus, seperti dalam surat al-Furqan, ayat 74 yang artinya:

“ Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Selain itu dalam surat al-Baqarah ayat 124 dijelaskan sebagai berikut:

“Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Kata ini juga bisa berarti orang yang memimpin di jalan kesesatan, seperti yang ditunjukkan dalam surat al-Qasas, ayat 41 Allah menjelaskan sebagai berikut:

“Artinya: Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong”.

Namun lepas dari semua arti ini, secara umum dapat dikatakan bahwa imam adalah seorang yang dapat dijadikan teladan yang di atas pundaknya

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t.p, 1984), h. 42-44.

terletak tanggung jawab untuk meneruskan misi Nabi SAW. dalam menjaga agama dan mengelola serta mengatur urusan negara.³²

c. *Imarah*

Imarah berasal dari kata *amara-ya'muru-amrun* yang berarti memerintah, lawan kata dari melarang. Pelakunya disebut amir yang berarti pangeran, putra mahkota, raja (*al-malik*), kepala atau pemimpin (*al-ra'is*), penguasa (*wali*). Selain itu juga bisa berarti penuntun atau penunjuk orang buta, dan tetangga. Adapun bentuk jamaknya adalah *Umara'*.³³

Kata *amara* muncul berkali-kali dalam al-Qur'an dan naskah-naskah awal lainnya dalam pengertian "wewenang" dan "perintah". Seseorang yang memegang komando atau menduduki suatu jabatan dengan wewenang tertentu disebut *sahib al-amr*, sedangkan pemegang *amr* tertinggi adalah *amir*. Pada masa-masa akhir abad pertengahan, kata sifat *amiri* sering digunakan dalam pengertian hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan atau administrasi.

³² Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.42.

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t.p, 1984), h. 41-42.

2. Tugas dan Fungsi Pemimpin

Al-Mawardi mengatakan bahwa pada umumnya, tugas pemimpin islam adalah menjaga kepentingan agama, urusan negara, dan umat. Al-Mawardi memang menekankan pada pemerintah untuk menjaga urusan agama. Baik dari aqidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak dan budi pekerti masyarakatlah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Bukan hanya masalah sandang, pangan dan papan sebagai hal yang penting, namun permasalahan agama tersebut lebih penting. jangan sampai berat sebelah, sehingga menciptakan kehidupan yang tidak seimbang seperti yang disebutkan di atas. Al-Mawardi mengenai tugas seorang khalifah negara yang dalam penjelasannya merinci masalah-masalah umum yang menjadi kekuasaan seorang khalifah ada sepuluh macam, antara lain:³⁴

Pertama, menjaga prinsip-prinsip agama (*hifzu ad-din*) yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Kekuasaan inilah yang membedakan kepala negara Islam dengan kepala negara manapun dari negara demokrasi di dunia ini, yang semata-mata hanya memimpin masalah-masalah duniawi. Khalifah sebagai kepala negara berkewajiban melindungi agama dari segala

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri(Jakarta: Darul Falah,2000), h. 23-24.

gangguan. Bukan hanya terhadap agama Islam yang menjadi asas negara, tetapi semua agama yang dianut rakyat harus mendapat perlindungan yang sama. Perlindungan dalam tingkatan pasif adalah memberi kebebasan bagi agama-agama itu untuk hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Dan dalam sifat aktif adalah memberi bantuan moril dan materiil. Bahkan sebagai kelanjutannya, negara dapat mendirikan kementrian agama yang khusus mengurus masalah-masalah agama. Kedua, mengepalai kekuasaan pemerintahan (*tanfizu al-Ahkam*). Dengan kekuasaan ini kepala negara adalah merupakan intansi tertinggi dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak yang bertetangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dzali tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah. Ketiga, melindungi berjalannya hukum dan Undang-Undang (Himayatu al-Baidha). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seluruh hak-hal rakyat yang harus dihormati, sehingga rakyat bebas meredaka mencari penghidupannya dan menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda. Keempat, menetapkan Undang-Undang (*Iqamatul al-Hudud*), salah satunya dengan menegakan supremasi hukum, agar dapat memelihara hukum-

hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan dan destruktif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan legislatif dalam negara demokrasi. Kepala negara melaksanakannya dengan bantuan dari parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Kelima, mengepalai seluruh angkatan perang (*Tahzhinu as-Tsugur*), mencegah timbulnya kerusuhan-kerusuhan di tengah masyarakat dengan kekuatan, sehingga tidak sampai ada permusuhan (*Agresi*) terhadap kehormatan atau sampai menumpahkan darah seorang muslim atau non Muslim yang tunduk pada ketentuan Islam. Keenam, menyatakan keadaan perang atau bahaya (*Jihadu man'ana*d), kalau negara terancam bahaya dari luar karena serangan musuh atau dari dalam karena perbuatan pengacau, maka kepala negara mempunyai hak untuk mengumumkan perang atau keadaan bahaya. Tapi menurut Imam Al-Mawardi yang dimaksud perang disini perang dalam arti sempit yaitu jihad melawan musuh Islam setelah lebih dahulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain. Ketujuh, mengawasi pemungutan iuran negara (*Jibayatu al-fai wa ash-Shadaqah*), menjaga hasil rampasan perang dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syari'at baik berupa nash atau jihad dengan tanpa rasa takut. Menurut pendapat Imam al-Mawardi

adalah supaya jangan dibebankan kepada rakyat tentang pembayaran pajak dan iuran yang memberatkan mereka, sehingga pemungutan negara harus bebas dari segala ketakutan dan paksaan. Kedelapan, memberikan anugerah dan pangkat kehormatan (*Taqdiru al-Athaya*), menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan oleh Baitul Mal dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya. Imam Mawardi memandangnya sebagai hak yang luas biasa yang hanya boleh digunakan kepala negara dengan sangat hati-hati tidak boleh secara royal dan keterlaluan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kesembilan, mengangkat pegawai-pegawai sipil dan militer (*Istikfau al-umana*), mencari orang-orang yang jujur dan amanat dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur. Kesepuluh, mencampuri pemerintahan (*Mubasyaratu al-umuri binafsih*) selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat dijadikan pegangan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Shaad ayat 26 yang artinya :

“Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.³⁵

3. Wewenang Pemimpin

Seorang khalifah atau kepala negara secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadits, dan kekuasaan dari rakyat yang telah memilih khalifah melalui wakil-wakilnya di Majelis Syura (lembaga legislatif) dengan jalan musyawarah. Kedua wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu meminta pertanggungjawaban yang bersifat ganda.³⁶ Pertanggungjawaban kepada Allah dihari kemudian, dan pertanggungjawaban kepada manusia di dunia ini.

Dalam mempertanggungjawabkan amanat Allah atas wewenang dan kekuasaan yang telah diberikanNya seorang khalifah harus berlaku jujur. Setiap

³⁵ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 5.

³⁶ Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Bina Ilmu, Cetakan Pertama: Surabaya, 1995). h. 173.

bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang khalifah mengakibatkan sanksi hukum jatuh kepadanya dalam bentuk “haram ia dimasukan ke surga”. Ketentuan ini tertuang dalam hadits Nabi saw yang berbunyi :

“Tidaklah seorang pemimpin (khalifah) yang dituntut Tuhan supaya menuntun rakyatnya, kemudian ia mati karena telah sampai ajalnya, padahal ia telah menyeleweng dalam kepemimpinannya itu, kecuali Allah mengharamkan surga baginya”. (HR. Muslim).

Pertanggungjawaban terhadap rakyat yang telah memilihnya melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif (majelis Syura) menuntut seorang khalifah harus senantiasa melakukan kepemimpinannya secara terbuka dan bersedia dikoreksi oleh rakyatnya. Tanpa harus tersinggung dan terhina. Setiap kebijakan politik yang diambil oleh seorang khalifah dapat dipertanggungjawabkannya di depan wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat secara individual atau kelompok, dapat meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan politik yang telah diambil seorang khalifah baik secara lisan maupun tulisan.

4. Hak dan Kewajiban Pemimpin

Hak pemimpin menurut al-Mawardi ada dua yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah ternyata ada hak

lain bagi imam yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.³⁷

Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai “Penganti Rasul”, memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara. Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meliputi: Pertama, melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid’ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan. Kedua, menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisish, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang yang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah. Ketiga, melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun dengan aman dari

³⁷ Rusdi Ali Muhammad, *politik islam*, (Yogyakarta: PT.Harun,pim dan Yasat, 2000), h. 27.

gangguan terhadap jiwa dan harta. Keempat, menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan kerusakan terhadapnya. Kelima, melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim. Keenam, memerangi orang yang menentang Islam setelah mendakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (*ahl dzimmah*), agar hak Allah terlaksana yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama. Ketujuh, mengambil fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau jihad tanpa rasa takut dan paksa. Kedelapan, menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya. Kesembilan, mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-

orang yang jujur. Kesepuluh, terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Apabila kepala negara atau khalifah telah menunaikan hak umat atau kewajibannya sebagai kepala negara, maka secara otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Maka dengan sendirinya pula ia (kepala negara) mempunyai hak atas umat.³⁸

5. Pemberdayaan Masyarakat

Islam adalah agama yang sempurna, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan cara serta solusi terhadap problematika kehidupan, baik masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, politik, mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Selain itu, Islam adalah agama yang membebaskan, membebaskan dari ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan ditengah-tengah masyarakat.

Agama yang selalu memberikan jawaban bagi setiap problematika yang dihadapi oleh umatnya. Pada konteks inilah, pemberdayaan masyarakat Islam

³⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 26.

diletakkan, yaitu memfasilitasi, memberdayakan umat Islam agar terbebas dari ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan dan lainnya yang menyebabkan mereka menjadi terpuruk.³⁹

Dari definisi tersebut, Islam mencoba membuat konsep tentang pemberdayaan masyarakat Islam. Pemberdayaan masyarakat Islam merupakan bagian dari dakwah. Namun kegiatan dakwah yang sudah mengalami perubahan paradigma. Paradigma dakwah konvensional yang masih terfokus kepada ibadah vertikal (hubungan Allah dengan hambanya). Paradigma dakwah yang lebih kepada perubahan sosial secara nyata, yaitu hubungan vertikal (hubungan Allah dengan hambanya) sekaligus hubungan horizontal (hubungan sesama manusia).

³⁹ Muhtadi Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2009), h. 34.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. DESA

1. Sejarah Singkat

Desa Suka Jaya dulunya adalah sebuah dusun yang mengalami pemekaran pada tahun 1994 dari dua desa yaitu Desa Salahaji dan Desa Halaban kecamatan Besitang, terjadinya pemekaran yang dipimpin oleh (Alm) Musa Yusmin dari Desa Salahaji dan desa Halaban (Alm) Abdul Rahman Syahputra. Pada tahun tersebut terjadilah pemekaran Dusun Suka Jaya yang mendapat hak istimewa dari pemerintah yaitu ditawarkan ingin ikut ke Kecamatan Pematang Jaya atau Kecamatan Besitang. Terjadilah tawar menawar antara pemerintah dengan tokoh masyarakat Dusun Suka Jaya, yang mana dari penawaran sebelumnya tokoh masyarakat lebih memilih Kecamatan Pematang Jaya apabila jarak antara Desa Salah Haji dengan Kecamatan Pematang Jaya itu dekat, tetapi nyatanya jarak antara keduanya sangat berjauhan. Karena jarak ke Kecamatan Pematang Jaya itu jauh, maka kemudian tokoh masyarakat yang berada di Dusun Suka Jaya memilih untuk ikut ke Kecamatan Besitang dikarenakan akses jalan lebih mudah dan jarak antara Dusun Suka Jaya dengan kecamatan Besitang itu lebih dekat. Dari hasil

kesepakatan pemerintah dengan tokoh masyarakat Dusun Suka Jaya, maka dirubahlah Dusun Suka Jaya menjadi Desa Suka Jaya.

Berdasarkan hasil informasi yang didapat dari tokoh agama Dusun Suka Jaya yang bernama Pak Rusli sebagai pelopor atau pembangun desa, beliau mengatakan setelah terbentuk menjadi sebuah Desa Suka Jaya, desa tersebut awalnya dihuni oleh 15 orang. Dengan di pelopori Pak Rusli dan 15 orang warga Desa Suka Jaya, mereka saling kerja sama untuk membangun Desa Suka Jaya dengan cara berhutang dengan penduduk desa lain untuk membuat batas-batas wilayah desa, membuat jalan-jalan menuju desa, membangun jembatan, membuat selokan-selokan, membuat kantor desa, dan lain sebagainya.⁴⁰

Setelah membangun kantor desa, maka warga perlu untuk mengangkat seorang kepala desa. Pertama, kepala desa pertama yaitu Pak Rusman yang dipilih melalui musyawarah mufakat dengan masa jabatan 1994 – 1998. Kedua, kepala desa kedua yaitu Pak Samadi yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dengan masa jabatan 1998 – 2007. Ketiga, kepala desa ketiga yaitu Pak Suwardi yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dengan masa jabatan 2007 – 2013. Keempat, dipilihlah pelaksana tugas kepala desa (PLT) bapak Tugino yang pemilihannya melalui permohonan

⁴⁰ Bapak Rusli, Tokoh Agama, wawancara pribadi, Desa Suka Jaya, Kabupaten Langkat, 18 Februari 2019.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan masa jabatan 2013 – 2014. Kelima, ditunjuklah pelaksana tugas kepala desa (PLT) Bapak Harlik oleh Camat Besitang dengan masa jabatan 2014 - 2015. Keenam, kepala desa selanjutnya ialah bapak Tugino yang pemilihannya melalui pemilihan kepala desa (PILKADES) masa jabatan 2015 – sekarang.⁴¹

2. Letak Geografis

Desa Suka Jaya merupakan desa terpencil yang berada di perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh, Jarak tempuh dari desa Suka Jaya ke Kecamatan membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh 36 km, dan jarak tempuh dari desa Suka Jaya ke Kabupaten kota 72 km dengan waktu sekitar 3 jam menggunakan kendaraan bermotor.

Secara geografis Desa Suka Jaya berbatasan langsung dengan dua desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Jawa Kecamatan Kejuruan Muda dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Seumedam Kecamatan Kejuruan Muda. Sedangkan dua yang lainnya berada di Provinsi Sumatera Utara yakni sebelah selatan berbatasan dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Salahhaji dan Pematang Siata Kecamatan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu.

⁴¹ Sumber data kantor Desa Suka Jaya dan wawancara.

Desa terluar Kecamatan Besitang ini, jika ditempuh melalui darat akan melintasi wilayah perbatasan Kabupaten Aceh tamiang provinsi Nanggroe aceh darussalam. Desa ini dikelilingi perkebunan swasta (PT. Sisiro) yang merupakan salah satu penghambat bagi masyarakat untuk menuju kota kecamatan. Pintu utama desa ini yang berada dalam kawasan perkebunan ditutup pukul 20.00 oleh pihak perkebunan sehingga menghambat lalu lintas warga. Hal ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Pada satu sisi desa ini berada di wilayah Sumatera utara sementara pada sisi yang lain perkebunan ini berada dan milik provinsi Nanggroe aceh darussalam. Pihak perusahaan mengklaim jalan perlintasan adalah milik mereka dan jika dilihat dari dasar hukum yang berlaku apabila sebuah jalan dilintasi oleh masyarakat dan merupakan jalan utama selama kurun waktu yang lama maka jalan tersebut menjadi milik masyarakat apalagi di dalamnya ada sebuah desa dengan sekumpulan masyarakat yang diatur oleh undang-undang.⁴²

Pembangunan di desa terluar di Kecamatan Besitang secara implisit menjadi bahan pertimbangan pihak pemerintahan dimana ketika dimasa konflik

⁴² Pnpm Besitang Langkat, *"Desa itu Bernama desa suka jaya"*, <http://www.pnpmbesitanglangkat.wordpress.com> (26 April 2019).

bersenjata yang terjadi menjadi imbas peningkatan pembangunan di desa Suka Jaya dan upaya menerobos terisolir menjadi tanggung jawab kita bersama.

3. Kondisi Demografis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demografis adalah ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberikan gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu kependudukan.⁴³

Desa Suka Jaya dengan kondisi agraris ini memiliki luas sebesar 1.808,70 Ha, yang terdiri dari sawah dengan luas 122,00 Ha, tanah kering dengan luas 352,44 Ha, tanah basah 0,00 Ha, tanah perkebunan dengan luas 1.313,00 Ha, fasilitas umum dengan luas 21,26 Ha, hutan dengan luas 0,00 Ha.

Untuk mengetahui lebih jelas luas wilayah menurut penggunaan di Desa Suka Jaya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

TABEL I
Komposisi Tanah Di Desa Suka Jaya

No	Tanah Sawah	Luas
1	Sawah irigasi	0,00 Ha

⁴³ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 212.

2	Sawah tadah hujan	122,00 Ha
3	Sawah pasang surut	0,00 Ha
	Total luas	122,00 Ha

No	Tanah Kering	Luas
1	Ladang	313,00 Ha
2	Pemukiman	3,63 Ha
3	Pekarangan	35,81
	Total Luas	352,44 Ha

No	Tanah basah	Lauas
1	Tanah rawa	0,00 Ha
2	Pasang surut	0,00 Ha
3	Lahan gambut	0,00 Ha
4	Situ/waduk/danau	0,00 Ha
	Total luas	0,00 Ha

No	Tanah perkebunan	Luas
1	Tanah perkebunan rakyat	1.133,00 Ha

2	Tanah perkebunan negara	0,00 Ha
3	Tanah perkebunan swasta	180,00 Ha
	Total luas	1.313,00 Ha

No	Tanah fasilitas umum	Luas
1	Kas desa/ kelurahan	0,00 Ha
	a. Tanah bengkok (tanah garapan)	0,00 Ha
	b. Tanah titi sara (tanah desa yang hasilnya untuk membiayai keperluan desa)	0,00 Ha
	c. Kebun desa	0,00 Ha
	d. Sawah desa	0,00 Ha
2	Lapangan olah raga	0,60 Ha
3	Perkantoran pemerintah	0,06 Ha
4	Ruang public/ taman kota	0,00 Ha
5	Tempat pemakaman desa/ umum	1,60 Ha
6	Tempat pembuangan sampah	0,00 Ha
7	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	2,00 Ha
8	Pertokoan	0,00 Ha

9	Fasilitas pasar	0,60 Ha
10	Terminal	0,00 Ha
11	Jalan	16,40 Ha
12	Daerah tangkapan air	0,00 Ha
13	Usaha perikanan	0,00 Ha
14	Sutet/ aliran listrik tegangan tinggi	0,00 Ha
	Total luas	21,26 Ha

No	Tanah hutan	Luas
1	Hutan lindung	0,00 Ha
2	Hutan produksi	0,00 Ha
	a. Hutan produksi tetap	0,00 Ha
	b. Hutan terbatas	0,00 Ha
3	Hutan konservasi	0,00 Ha
4	Hutan adat	0,00 Ha
5	Hutan asli	0,00 Ha
6	Hutan sekunder	0,00 Ha
7	Hutan buatan	0,00 Ha
8	Hutan mangrove	0,00 Ha

9	Hutan suaka	0,00 Ha
	a. Suaka alam	0,00 Ha
	b. Suaka margasatwa	0,00 Ha
10	Hutan rakyat	0,00 Ha
	Total luas	0,00 Ha

Sumber Data : Kantor Desa Suka Jaya 2017/2018

Iklim di desa Suka Jaya memiliki curah hujan sebesar 1,99 mm, jumlah bulan hujan 6 bulan, suhu rata-rata harian 30 derajat celcius dan ketinggian antara 40 meter di atas permukaan laut (mdpl).⁴⁴

B. Penduduk

1. Agama

Dalam usaha membangun masyarakat, agama merupakan salah satu unsur yang penting sebagai kerangka intitusi dari keseluruhann sistem sosial, sebagai bangsa yang beragama dituntut supaya nilai-nilai agama yang luhur dan universal benar-benar menjiwai kehidupan masyarakat, dihayati, dan diamalkan oleh masyarakat. Dalam kaitan itulah pemerintah berkewajiban dan mengembangkan untuk menambah sarana kehidupan beragama supaya

⁴⁴ Sumber data kantor Desa Suka Jaya 2017/2018.

kesadaran, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat semakin baik dan mendalam.⁴⁵

Agama dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Peranan agama dalam masyarakat pada kehidupan manusia itu sendiri sangat berperan. Kondisi keagamaan suatu wilayah sangat penting untuk melihat kondisi umum dalam kehidupan beragama mereka. Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat umumnya beragama Islam, Meskipun penganut agama lain juga ada. Meskipun demikian masyarakat bebas untuk menentukan kepercayaan atau agama yang dianut tanpa ada paksaan.

Untuk mengetahui lebih jelas penganut agama di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL II
Komposisi Penduduk Menurut Agama Di Desa Suka Jaya

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Islam	1.351 Jiwa	69,21%
2	Kristen	198 Jiwa	10,14%
3	Khatolik	403 Jiwa	20,64%
4	Budha	0 Jiwa	0%

⁴⁵ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama*, CV Toha Putra, Semarang, 1997, h. 97.

5	Hindu	0 Jiwa	0%
6	Kong hu cu	0 jiwa	0%
Jumlah		1.952	100%

Sumber Data : Kantor Desa Suka Jaya 2017/2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa agama Islam merupakan yang terbanyak dianut oleh penduduk Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang dengan jumlah 1.351 jiwa atau (69,21%) , sementara yang beragama Kristen sebanyak 198 jiwa (10,14%), setelah ini diikuti agama Katholik sebanyak 403 jiwa (20,64%), Budha (0%), Hindu (0%) dan Kong hu cu (0%).

Adapaun untuk sarana ibadah di Suka Jaya Kecamatan Besitang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

TABEL III

Komposisi Rumah Ibadah Desa Suka Jaya

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholah	3
3	Gereja	5
	Jumlah	10

Sumber Data : Kantor Desa Suka Jaya 2017/2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua (2) masjid yaitu :
Pertama, masjid Nurul Huda beralamat di dusun I Suka Tani Desa Suka Jaya.
Kedua, masjid Al-Muttaqin beralamat di dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya.
Terdapat tiga (3) musholah yang terletak di dusun II, dusun IV dan dusun V,
sementara terdapat (5) gereja yaitu: Pertama, gereja Khatolik Santo Yosep
Tungkam Jaya beralamat di dusun V Tungkam Jaya Desa Suka Jaya. Kedua,
gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Tungkam Jaya beralamat di dusun
V Desa Suka Jaya. Ketiga, gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indoneasia)
Tungkam Jaya beralamat di dusun V Tungkam Jaya Desa Suka Jaya. Keempat,
gereja Bethel Indonesia beralamat di dusun V Tungkam Jaya Desa Suka Jaya.
Kelima, gereja GPI (Gereja Pentakosta Indonesia) beralamat di dusun IV Suka
Maju Desa Suka Jaya.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat perlu dan penting untuk diperhatikan. Pendidikan juga penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan salah satu instrumen yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ada beberapa tingkat pendidikan diantaranya tidak tamat/tamat

TK/PAUD, MDA/TPA, SD, SLTP, dan SLTA, ada juga yang belum dan tidak sekolah, hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL IV
Komposisi Penduduk yang bersekolah di Desa Suka Jaya

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	70	61	131
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play grup	4	8	12
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	7	5	12
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	220	217	437
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	8	12	20
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	2	1	3
7	Tamat SD/ sederajat	290	332	622
8	Tamat SMP/ sederajat	167	108	275

9	Tamat SMA/ sederajat	196	156	352
10	Tamat D-2/ sederajat	0	1	1
11	Tamat D-3/ sederajat	7	7	14
12	Tamat S-1/ sederajat	5	6	11
13	Tamat S-2/ sederajat	1	1	2
	Total	-	-	1.892

Sumber Data : Kantor Desa Suka Jaya 2017/2018

Dari pengumpulan data diatas, kurang lebih 60 warga desa Suka Jaya yang berusia di bawah 3 tahun belum tercatat didata Komposisi Penduduk yang bersekolah di Desa Suka Jaya. Data tabel di atas dapat dilihat bahwa yang paling banyak dari penduduk Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dari segi pendidikan adalah yang paling banyak tamat SD sebanyak 622 orang, dan disusul tamat SMA dengan jumlah sebanyak 352 orang. Sementara tamat SMP berjumlah 275 orang, S-2 2 orang, S-1 11orang, Diploma berjumlah 15 orang dan selanjutnya SD tapi tidak tamat 3 orang, dan tidak pernah tamat sekolah berjumlah 20 orang.

Adapun untuk sarana pendidikan di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

TABEL V
Komposisi Lembaga Pendidikan di Desa Suka Jaya

No	Lembaga	Jumlah
1	TK/PAUD	3
2	Raudhatul Athfal	1
3	SDN	2
4	SMP	1
5	SMA	1
Jumlah		8

Sumber Data : Kantor Desa Suka Jaya 2017/2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga pendidikan yang ada di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan jumlah 8 Unit dengan rincian TK/PAUD 3 unit, Raudhatul Athfal 1 unit, SDN 2 unit, SMP 1unit, SMA 1 unit.

3. Pekerjaan

Dalam upaya kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya memiliki usaha-usaha atau mata pencaharian mereka yang berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai Pegawai Sipil, ada yang bekerja Pedagang, Wiraswasta, Guru, Buruh, dan ada juga kerja sebagai Karyawan Swasta dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel VI

Komposisi Mata Pencarian Penduduk Di Desa Suka Jaya

No	Jenis Pekerjaan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Petani	310	120	430
2	Buruh tani	12	6	18
3	Buruh migran	0	2	2
4	Pegawai negeri sipil	6	6	12
5	Pedagang barang kelontong	2	0	2
6	Montir	1	0	1
7	Perawat swasta	0	1	1
8	Bidan swasta	0	4	4
9	TNI	1	0	1
10	Guru swasta	2	5	7
11	Pembantu rumah tangga	0	1	1
12	Karyawan perusahaan swasta	2	1	3
13	Wiraswasta	179	36	215
14	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	44	9	53
15	Belum bekerja	142	134	276
16	Pelajar	259	252	511
17	Ibu rumah tangga	0	347	347
18	Perangkat desa	2	1	3
19	Buruh harian lepas	32	8	40
20	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	1	1	2
21	Tukang jahit	0	1	1
22	Karyawan honorer	0	1	1
23	Ustad	0	0	0
24	Guru ngaji	2	3	5
	Total	-	-	1936

Sumber Data : Kantor Desa Suka Jaya 2017/2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang yang bekerja sebagai petani sebanyak 430 orang dan juga yang belum bekerja sebanyak 276 orang serta tidak mempunyai pekerjaan tetap sebanyak 53 Orang.

4. Sosial Budaya

Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang terdiri dari 556 KK, sedangkan jumlah penduduk Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang menurut hasil sensus penduduk tahun 2018 berjumlah 1952 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 1.010 jiwa dan perempuan sebanyak 942 jiwa, ini menurut data statistik yang diperoleh di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel VII
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
Di Desa Suka Jaya

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.010	51,74%
2	Perempuan	942	48,26%
	Jumlah	1.952	100%

Sumber Data : Kantor Desa Suka Jaya 2017/2018

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih beberapa saja, dimana penduduk laki-laki berjumlah 1.010 dan penduduk perempuan berjumlah 942. Untuk itu dapat disimpulkan penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peraturan Hukum Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur lingkungannya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya.

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, serta Undang-undang⁴⁶ Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN Tahun 1999, khususnya dalam arah kebijakan pembangunan daerah, antara lain dinyatakan mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

⁴⁶ Selanjutnya akan disingkat menjadi UU

⁴⁷ Mohammad Anshor, *"Pengembangan Masyarakat Islam,"* <http://anshorfazafauzan.com> (27 Juni 2019)., h. 1

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegaskan bahwa hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Mencermati rumusan kebijakan pemerintah di dalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah, setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam UU No.6/2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) menjelaskan yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Lahirnya UU tersebut membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertulis dalam bab I, Pasal 1 Penjelasan 12, UU No.6/2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁴⁸

Dalam UU No.6/2014 pada bab XIV, pasal 112 ayat 3 juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: Pertama, menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Kedua, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Ketiga, mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.⁴⁹

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa, forum

⁴⁸ Abdul Rauf, *"Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,"* <http://www.scribd.com> (27 Juni 2019), h.2

⁴⁹ *Ibid*, h. 3

musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, badan usaha milik (BUM) desa, badan kerja sama antar desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan: Pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swaloka oleh desa. Kedua, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di desa. Ketiga, menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan sesuai dengan kearifan lokal. Keempat, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin, warga disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal. Kelima, mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa. Keenam, mendayagunakan lembaga masyarakat desa dan lembaga adat. Ketujuh, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui masyarakat desa. Kedelapan, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa. Kesembilan, melakukan pendampingan desa yang berkelanjutan. Kesepuluh, melakukan

pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.⁵⁰

Secara legal formal, dalam UU No. 6/2014 Pasal 112 Ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pendampingan termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Selanjutnya dalam PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No. 6/2014 junto PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 23 tahun 2014 Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 tentang desa telah memandatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendamping secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendamping desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.⁵¹

⁵⁰ Tatang Suhenndra, "*Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*," <http://www.academia.edu> (29 Juni 2019), h. 2.

⁵¹ *Ibid*, h.3.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 mengenai prioritas penggunaan dana Desa untuk tahun 2018 yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada pasal 7 yang di prioritaskan meliputi: Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan pembangunan desa. Kedua, pengembangan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga. Ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dituntun oleh Permendesa Nomor 19 tahun 2017 sebagai Pedoman dan Penetapan, dana desa 2018. Dalam Batang Tubuh dan lampiran Permendesa ini disebutkan pada bab III Pasal 4 Ayat (1) bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun maksud, tujuan, dan manfaat Permendesa ini adalah: Pertama, sebagai pedoman umum penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dengan dana desa. Kedua, bertujuan untuk menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan

gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa untuk tahun 2018. Ketiga, Permendesa ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan dana desa, serta pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa, dan sebagai pedoman bagi desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara (masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan).

B. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasinya

Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Di Desa Suka Jaya terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik yang menitik beratkan pada meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Suka Jaya Bapak Tugino mengenai program pemberdayaan masyarakat, dikemukakan sebagai berikut:

“Program pemberdayaan masyarakat sudah sering kami bahas setiap anggaran kami buat (yang namanya) pembinaan pelatihan pemberdayaan itu semacam kegiatan-kegiatan untuk kaum wanita dan bapak-bapak. Tentunya pertama disektor kerajinan jahit menjahit sudah kita upayakan, untuk bapak-bapaknya karena disini dominan peternakan sapi kita buat (yang namanya) pelatihan-pelatihan dan kita datangkan ahli-ahli untuk menambah pengetahuan memelihara sapi-sapi dengan baik itu kita berikan”.⁵²

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam

⁵² Wawancara bersama Bapak Tugino, kepala desa , Suka Jaya, 18 Februari 2019, di Kantor Desa.

mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan memberikan manfaat baik bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Sedangkan pengetahuan dan kesadaran tentang cara – cara memelihara dan meningkatkan potensi diri adalah awal dari bagian dalam pemberdayaan masyarakat. Kesadaran dan pengetahuan tersebut merupakan tahap awal timbulnya kemampuan, karena kemampuan merupakan hasil proses belajar.⁵³

Menurut Bapak Tugino bahwa program pemberdayaan yang dicanangkan selama menjabat menjadi kepala desa ialah pertama, pelatihan jahit menjahit dan yang kedua pelatihan ternak sapi. Pelatihan jahit menjahit dan pelatihan ternak sapi ini dilakukan pertama kali pada bulan Mei tahun 2018. Pelatihan ini dibuat di kantor desa dan peserta yang mengikuti pelatihan ini tidak dibatasi tetapi antusias masyarakat yang mengikuti dalam pemberdayaan ini tidak banyak hanya 10 sampai 15 orang saja. Pelatihan jahit menjahit ini dilakukan dua minggu sekali selama tiga bulan lamanya. Sedangkan pelatihan ternak sapi dilakukan dua minggu sekali selama dua bulan.

⁵³ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 106.

Untuk pelatihan jahit menjahit dan ternak sapi pemerintahan desa mendatangkan guru atau pelatih yang benar-benar kompeten dibidangnya.⁵⁴

Bapak Turiadi selaku tokoh masyarakat menyebutkan dua program lain pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa yakni: olahraga dan MTQ.⁵⁵ Menurutnya program pemberdayaan ini juga dilakukan oleh kepala desa dalam bentuk olahraga dan MTQ.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Turiadi, Bapak Jhoni Samosir kepala dusun V memberikan tanggapan hampir sama mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa suka jaya dikemukakan sebagai berikut:

“Pemberdayaan (selalu dan selalu) setiap tahun selalu ada pemberdayaan program jahit menjahit, home industri maupun di olahraga dan (selalu) Pak Kades selalu mencanangkan itu setiap tahunnya dan kita juga sudah merasakan ibu-ibu sekarang sudah ada berapa kelompok bisa menjahit baju sendiri mungkin ke depan mereka akan memproduksi.”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara bersama Bapak Tugino, kepala desa , Suka Jaya, 18 Februari 2019, di Kantor Desa.

⁵⁵ Wawancara bersama Bapak Turiadi, Tokoh Masyarakat, Suka Jaya, 18 Februari 2019, di Kantor Desa.

⁵⁶ Wawancara bersama Bapak Jhoni Samosir, kepala dusun V, Suka Jaya, 18 Februari 2019.

Menurut pendapat Pak Jhoni Samosir, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa selalu ada setiap tahunnya. Beliau merasakan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa sangat membantu.

Bapak Ruddin Sigito Kepala dusun IV desa Suka Jaya menjelaskan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa, sebagai berikut:

“Kalau menurut kami (program pemberdayaan ini) sangat baik (ya tetap) kepala desa ini memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi setiap ada usulan atau keluhan (bahwa) Pak Kades tetap menanggapi dengan serius”.⁵⁷

Menurut Pak Ruddin Sigito program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa sudah sangat baik. karena ia selalu mendengarkan dan menanggapi setiap usulan maupun keluhan dari masyarakat.

Sementara Bapak Rusli selaku tokoh agama Desa Suka Jaya mengungkapkan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa, sebagai berikut:

“Saya rasa kalau pemberdayaan masyarakat itu sering diajukan cuma (tinggal tanggapannya dari) masyarakat kurang menanggapi, kurang (istilahnya itu) mengerjakan, begitukan terpulang dari masyarakatnya.

⁵⁷ Wawancara bersama Bapak Ruddin Sigito, kepala dusun IV, Desa Suka Jaya, 18 Februari 2019, di Kantor Desa.

Sebetulnya masyarakat itu kalau memang desa memenuhi kemauan kepala desa ya alhamdulillah juga sebenarnya, cuma masyarakatnya kan (sering inikan) maunya kontan, (yakan) repot juga (kan) kalau begini sebenarnya (kan) harus kerja dulu capek dulu baru dapat, jadi ini belum capek kerja udah mau dapat hasil, kadang repot juga jadi kepala desa ini harus kuat memang apapun ceritanya kepala desa ini tak lihat juga kayak lumbung sampah (yakan)".⁵⁸

Bapak Rusli berpendapat bahwa pemberdayaan itu sudah sering dilaksanakan tetapi masyarakat desa Suka Jaya kurang menanggapi dan kurang peduli. Masyarakat Desa Suka Jaya tidak mau berusaha dan tidak mau repot serta mereka hanya ingin hasil dan tak mau berusaha.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Pak Rusli, Bapak Toni Hartono selaku tokoh agama desa Suka Jaya mengatakan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa, yakni:

"Pemberdayaan ini memang kalau kita nilai agak kurang. Yang saya rasakan pemberdayaan yang dilakukan kepala desa kurang berjalan".⁵⁹

Dalam pandangan Bapak Toni Hartono tokoh agama desa Suka Jaya tentang program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa bahwa program tersebut kurang berjalan karena masyarakat desa Suka Jaya kurang

⁵⁸ Wawancara bersama Bapak Rusli, Tokoh Agama, Suka Jaya, 19 Februari 2019, di rumah Bapak Rusli.

⁵⁹ Wawancara bersama Bapak Toni Hartono, Tokoh Agama, Suka Jaya, 19 Februari 2019, di rumah Bapak Toni Hartono.

menanggapi perihal pelatihan pelatihan yang diadakan pemerintah desa, jadi program pemberdayaan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh kepala desa.

Bapak Supriadi selaku tokoh masyarakat Desa Suka Jaya berpendapat mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa. Katanya: ya kalau dibilang tahu saya tahu, ya kalau dibilang enggak ya enggak.⁶⁰

Menurut pendapat Bapak Supriadi tentang program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa beliau tidak mengetahui jelas apa-apa saja program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa. Ini berarti kepala desa dan tokoh masyarakat kurang bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat.

Beberapa wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala desa, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat pada penjelasan sebelumnya memberikan keterangan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kepala Desa Suka Jaya ada empat yakni jahit menjahit, pemeliharaan sapi, MTQ, serta dalam bidang olahraga dan akan dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut:

⁶⁰ Wawancara bersama Bapak Supriadi, Tokoh Masyarakat, Suka Jaya, 18 Februari 2019, di Kantor Desa.

Pertama, pelatihan jahit menjahit dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada setiap dua minggu sekali selama tiga bulan yang dilaksanakan di kantor desa dan dilatih oleh pelatih yang mahir serta berkompeten dalam bidang menjahit. Sementara itu peserta dalam pelatihan jahit menjahit tidak dibatasi oleh pemerintahan desa. Pihak pemerintahan desa dalam melaksanakan pelatihan jahit menjahit menyediakan seluruh kebutuhan jahit menjahit seperti, tiga buah mesin jahit, benang, jarum dan sebagainya.⁶¹

Menurut pendapat Ibu A warga Desa Suka Jaya mengenai penerapan pelatihan jahit menjahit yang beliau lakukan setelah mengikuti pelatihan tersebut yakni: tidak ada. Karenakan saya (agak) susah dalam menerapkan jahit menjahit ini (buk), alat untuk menjahitpun saya belum ada.⁶²

Ibu A menjelaskan mengenai penerapan yang ia lakukan setelah mengikuti pelatihan jahit menjahit tidak ada karena beliau merasa sulit untuk menerapkan apa yang beliau dapat selama pelatihan tersebut.

Hampir sama dengan yang dikatakan oleh Ibu A, Ibu B warga Desa Suka Jaya mengenai penerapan pelatihan jahit menjahit yang ibu lakukan setelah mengikuti pelatihan, dikemukakan sebagai berikut:

⁶¹ Lihat transkrip wawancara

⁶² Wawancara bersama ibu A, warga desa Suka Jaya, tanggal 20 februari 2019.

“sebenarnya saya ingin menerapkan apa apa yang sudah di dapatkan (gitu buk), tetapi kan saya belum ada medianya (kan gitu buk), jadi penerapannya tertunda (emmm....) tetapi kalaulah (yakan) saya bisa membeli mesin jahit inshaallah saya akan menerapkannya (buk)”.⁶³

Menurut ibu B mengenai penerapan pelatihan jahit menjahit yang dilakukan setelah mengikuti pelatihan, beliau mengatakan sebenarnya beliau ingin menerapkan apa yang sudah didapat selama pelatihan akan tetapi terhambat oleh media yang belum ada.

Kedua, pelatihan pemeliharaan sapi dilaksanakan seperti halnya pelatihan jahit menjahit. Pada dasarnya masyarakat desa Suka Jaya sudah beternak sapi sehingga pemerintahan desa hanya memberikan pelatihan tentang bagaimana memelihara sapi dengan baik. Pelatihan tersebut dilaksanakan setiap dua minggu sekali yang berlangsung selama dua bulan oleh pelatih yang ditugaskan pemerintahan desa dengan peserta tanpa dibatasi. Pelatihan tersebut dilaksanakan di kantor desa.⁶⁴

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Bapak C warga desa Suka Jaya mengenai penerapan pelatihan pemeliharaan ternak sapi, sebagai berikut:

“Ya setelah saya mendapatkan ilmu dari pelatihan ternak sapi itu (yakan buk), saya menerapkan (seperti apa ya....) seperti bagaiman mencegah

⁶³ Wawancara bersama ibu B, warga desa Suka Jaya, tanggal 20 februari 2019.

⁶⁴ Lihat traskip wawancara bersama Bapak Tugino

hewan itu terserang penyakit seperti (itu buk) dan vitamin apa yang diperlukan (gitu buk),”⁶⁵

Bapak C menjelaskan mengenai penerapan pelatihan pemeliharaan sapi yang beliau rasakan bahwa beliau semakin faham dan mengerti mengenai pemeliharaan sapi yang baik dan benar dan dengan adanya pelatihan yang dibuat oleh pemerintah desa beliau dapat menerapkan apa yang sudah beliau dapatkan selama mengikuti pelatihan tersebut.

Senada dengan yang dikatakan Bapak C, Bapak D yang merupakan warga Desa Suka Jayajuga mengatakan mengenai penerapan pelatihan pemeliharaan sapi, sebagai berikut:

“Menurut saya setelah saya mengikuti pelatihan ini, yang saya rasakan (ya buk), ke depannya saya bisa mengembangkannya dan bisa menerapkan apa yang saya dapat dari pelatihan ini. Dengan memberikan makanan yang sehat, memberi vitamin setiap bulannya dan membersihkan kandangnya agar sapi tersebut tidak mudah terserang penyakit”.⁶⁶

Bapak D menjelaskan mengenai penerapan pelatihan ternak sapi tersebut, ia merasakan bahwa dengan adanya pelatihan yang diadakan pemerintah desa dirinya semakin faham dan mengerti bagaimana

⁶⁵ Wawancara bersama Bapak C, Warga Desa Suka Jaya, Tanggal 20 Februari 2019.

⁶⁶ Wawancara bersama Bapak D, Warga Desa Suka Jaya, Tanggal 20 Februari 2019.

mengembangkan ternak sapi dan apa-apa saja yang perlu dilakukan agar sapi tidak terserang wabah penyakit.

Berbeda halnya dengan Bapak C dan D, Bapak E berpendapat mengenai penerapan pelatihan ternak sapi, sebagai berikut:

“tidak ada penerapan yang saya lakukan (buk). Gimana (ya buk) kalau dibilang (inikan) saya belum mempunyai modal untuk membeli sapi untuk saat ini saya cuma bisa menjaga punya orang saja (buk)”.⁶⁷

Sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak E, Bapak F juga mengatakan:

“Bahwa penerapan ini belum bisa dilakukan (buk) dikarenakan (ya buk) pemerintah desa hanya memberikan pelatihan sekedarnya saja (buk) seperti cara memelihara ternak itu seperti apa, memberi makan itu seperti apa. Tapi kan (ya buk) yang kami mau setidaknya pemerintah desa memberikan bantuan lain seperti mendatangkan dokter hewan untuk memeriksa ternak kami (kan gitu buk) supaya apa (buk) supaya kami bisa mengembangkan ternak kami (buk).⁶⁸

Bapak E dan Bapak F berpendapat untuk penerapan tersebut belum bisa diterapkan sepenuhnya. Mereka juga mengharapkan agar pemerintah desa memberikan bantuan lain untuk bisa mengembangkan ternak-ternak mereka.

Ketiga, dalam bidang keagamaan kepala desa mengadakan MTQ setiap tahunnya yang mana setiap dusunnya terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan satu tahun sekali pada bulan November.

⁶⁷ Wawancara bersama Bapak E, Warga Desa Suka Jaya, Tanggal 20 Februari 2019.

⁶⁸ Lihat transkrip wawancara bersama Masyarakat Desa Suka Jaya

Bapak Toni Hartono mengatakan:

“Sebetulnya kalau program kepala desa tentang keagamaan ada, karena itu salah satu mendukung kegiatan keagamaan (itukan) seorang kepala desa (itukan) tidak bisa mengambil keputusan tanpa adanya respon atau reaksi kalau kami sebagai masyarakat tidak ada reaksi tak mungkin kepala desa punya respon. Salah satu yang saya rasakan bapak kepala desa yang sekarang ini Bapak Tugino ini saya membuat suatu reaksi . reaksi apa yang saya buat, pak tolong adakan MTQ setingkat desa (nah) Alhamdulillah satu tahun kemudian beliau merespon dan kita sudah melaksanakan yang kemarin sudah (emmm.....) kali yang keempat karena sudah tiga kali tropi utama dipegang oleh Dusun III Suka Mulya jadi kemarin kami mengadakan bulan sebelas kali yang keempat (itulah) karena program itu kita laksanakan. Saya tawarkan dan saya ajukan keagamaan ini ketika itu beliau menjadi Plt pelaksana tugas (itulah).⁶⁹

Menurut pandangan Bapak Rusli mengenai pemberdayaan dalam bidang keagamaan yang dilakukan kepala desa, sebagai berikut:

“Ya saya rasa untuk bidang keagamaan itu memang sesekalilah ya tidak mendetail kali. Karena agama ini (yakan) istilahnya (itukan) sudah kurang kalau orang yang memang (yakan) harus memang kuat dasar iman tadi (baru ya kan). Tapi kalau sekitar 60-70% itukan istilahnya (itukan) bisa dibilang separuh (karena....) karena bukan di bidangnya itu”.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara bersama Bapak Toni Hartono, Tokoh Agama, Suka Jaya, 19 Februari 2019, di rumah Bapak Toni Hartono.

⁷⁰ Wawancara bersama Bapak Rusli , Tokoh Agama, Suka Jaya, 19 Februari 2019, di rumah Bapak Rusli.

Keempat, dalam bidang olahraga pemerintah desa juga menyediakan beberapa alat untuk mendukung kegiatan olahraga seperti tenis meja, dan bola voli.

Menurut Bapak Bobby Irawan mengenai kegiatan olah raga yang dilakukan kepala desa beliau mengatakan:

“Pemerintahan desa menyediakan alat-alat olahraga untuk mendukung kegiatan pemuda setempat agar pemuda setempat bisa mengembangkan bakat mereka. Dan untuk ke depannya yang saya harapkan dari kepala desa agar menambah media serta alat-alat olah raga lainnya.”⁷¹

Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Bobby, Bapak Andi juga mengatakan:

“Dengan adanya pemerintah desa memberikan fasilitas olahraga ini menurut saya ini bertujuan agar para pemuda Desa Suka Jaya bisa melakukan hal-hal positif dengan mengembangkan kemampuan mereka agar para pemuda setempat jauh dari hal negatif seperti terjerumus narkoba”.

Menurut Bapak Bobby dan Bapak Andi mengenai kegiatan olahraga yang dilakukan kepala desa bahwa mereka menyambut program ini dengan positif. Mereka mendukung apa yang telah dilakukan kepala desa untuk mengembangkan bakat-bakat pemuda setempat. Namun hal ini perlu

⁷¹ Wawancara bersama Bapak Bobby, Tokoh pemuda, Desa Suka Jaya. Tanggal 19 Februari 2019.

diperhatikan oleh kepala desa agar kepala desa menambah fasilitas dalam bidang olahraga.

Adapun implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa akan dipaparkan sebagai berikut:

Bapak Tugino kepala Desa Suka Jaya menyampaikan mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat. Ia mengemukakan sebagai berikut:

“Implementasi pemberdayaan di sektor peternakan dan jahit menjahit untuk peningkatan ekonomi. yang kita sangat sayangkan (begini) setelah kita adakan dan berikan pelatihan masyarakat ini tidak ada berupaya untuk kemandirian. Nah, mereka ini selalu bergantung dengan pemerintah desa. Sebenarnya kalau yang saya mau dan saya inginkan sering saya sampaikan di rapat-rapat forum dan rapat desa bahwasanya dengan seiring bantuan yang kita kucurkan (ataupun apa namanya) pemberdayaan yang kita berikan itu jangan semata-mata mengharapkan dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Tetapi setidaknya kita berupaya untuk swadaya yang kita berikan berkelanjutan. Itulah yang sangat saya sayangkan masyarakat ini kepeduliannya sangat kurang”.⁷²

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi 1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; 2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan

⁷² Wawancara bersama Bapak Tugino, Kepala Desa, Suka Jaya, Tanggal 18 Februari 2019, di Kntor Desa.

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; dan 3) tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.⁷³

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Ini berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status masyarakat yang mandiri.⁷⁴

Bapak Tugino berpendapat bahwa masyarakat Desa Suka Jaya selama ini tidak ada kemandiriannya. Setelah mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa mereka terus menerus bergantung kepada pemerintah desa sedangkan yang di harapkan oleh kepala desa masyarakat yang telah diberi pelatihan bisa mengembangkan apa yang mereka dapat. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat enggan memperdulikan hal yang diinginkan oleh kepala desa sehingga pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa tidak berjalan seperti yang di harapkan oleh kepala desa.

⁷³ Teguh Sulistiyani dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu: 2009, h.36

⁷⁴ Gunawan Sumodinigrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 55

Bapak Ruddin Sigito kepala dusun IV Desa Suka Jaya menjelaskan mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa, dikemukakan sebagai berikut:

“Implementasi pemberdayaan masyarakat sudah menyentuh perekonomian tetapi sebagian warga inipun ada yang tidak peduli. Kalau kerja pak kades ini cukup membina, membimbing”.⁷⁵

Menurut Bapak Ruddin Sugito implementasi pemberdayaan yang dilakukan kepala desa sudah menyentuh hanya saja masyarakat desa tidak peduli akan adanya pemberdayaan yang dilakukan kepala desa.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Ruddin Sigito, Bapak Jhoni Samosir kepala dusun V berpendapat mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa Suka Jaya, menyentuh dan adil.⁷⁶

Sementara Bapak Jhoni Samosir berpendapat bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat sudah menyentuh serta merata. Bapak Rusli juga

⁷⁵ Wawancara bersama Bapak Ruddin Sugito, Kepala Dusun IV, Suka Jaya, Tanggal 18 Februari 2019. Di Kantor Desa.

⁷⁶ Wawancara bersama Bapak Jhoni Samosir, Kepala Dusun V, Suka Jaya, Tanggal 18 Februari 2019, di Kantor Desa.

menyampaikan mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa, sudah berjalan.⁷⁷

Dalam pandangan Bapak Rusli mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat sudah berjalan. Karena menurut ia pemberdayaan masyarakat sudah sering diajukan oleh kepala desa tinggal saja terpulang dari masyarakatnya saja mau mengikuti ataupun tidak. Ia juga mengatakan masyarakat desa ini tidak mau repot dan mau instannya saja, tidak mau bekerja tetapi mau mendapatkan hasil.⁷⁸

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Rusli, Bapak Toni Hartono selaku tokoh agama mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa, kurang berjalan.⁷⁹ Bapak Toni Hartono menjelaskan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kepala desa kurang berjalan karena beliau menelai dan merasakan bahwa selama ini pemberdayaan masyarakat di desa Suka Jaya kurang berjalan.

⁷⁷ Wawancara bersama Bapak Rusli, Tokoh Agama, Suka Jaya, Tanggal 19 Februari 2019, di Rumah Bapak Rusli.

⁷⁸ Lihat traskip wawancara

⁷⁹ Wawancara bersama Bapak Toni Hartono, Tokoh Agama, Suka Jaya, Tanggal 19 Februari 2019, di Rumah Bapak Toni Hartono.

Bapak Supriadi selaku tokoh masyarakat Desa Suka Jaya menyampaikan mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa, insya Allah ada.⁸⁰ Menurut Bapak Supriadi implementasi pemberdayaan masyarakat sudah ada dilaksanakan akan tetapi tidak semua program bisa dilaksanakan itu karena minimnya pelatihan yang dibuat oleh kepala desa.

Implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa bahwa pemerintahan desa Suka Jaya sudah berupaya memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi masyarakat desa kurang menanggapi apa yang diberikan oleh pemerintah desa. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa sudah semaksimal mungkin dijalankan tetapi tidak terealisasi dengan baik sebab setelah diberikan pelatihan kepada masyarakat, masyarakat tidak berupaya untuk kemandirian mereka dan mereka selalu bergantung dengan pemerintahan desa. Sehingga pemberdayaan tersebut tidak berjalan dan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemerintahan desa.

Sementara itu tujuan akhir pemberdayaan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, sebab perekonomian yang sebelumnya cukup

⁸⁰ Wawancara bersama Bapak Supriadi, Tokoh Masyarakat, Suka Jaya, Tanggal 18 Februari 2019.

ketinggalan agar kedepannya bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan begitu masyarakat desa Suka Jaya bisa melaksanakan dan mengembangkan apa yang telah diberikan oleh pemerintahan desa. Dan untuk itu pemerintah desa dan masyarakat desa haruslah bekerja sama dalam mengembangkan potensi dari masyarakat desa dalam menunjang perekonomian desa melalui program pemberdayaan tersebut.

C. Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Faktor penunjang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa Suka Jaya ada tiga yaitu keturunan, kewibawaan dan kekuasaan, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Keturunan. Bagi masyarakat desa merupakan hal yang perlu diperhatikan jika hendak melaksanakan perannya sebagai seorang kepala desa, karena di dalam masyarakat desa masih terdapat sekelompok masyarakat yang senantiasa mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang masih sangat kental. Keturunan yang dimaksud di sini adalah karena nenek moyangnya, orang tuanya, bahkan keluarganya pada zaman dahulu memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat sehingga ia memperoleh pengakuan

masyarakat akan keberadaannya dalam masyarakat secara turun temurun walaupun telah terjadi pergeseran nilai-nilai tapi di kalangan masyarakat desa masih diakui sebagai tokoh, sebagai panutan yang mempunyai pengaruh secara kharismatik.⁸¹

Masyarakat di Desa Suka Jaya sendiri masih menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang sifatnya turun temurun yang ada dalam masyarakat. Walaupun masyarakat desa sudah mengalami pergeseran budaya dan kultur, namun ada nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang masih sangat dijaga oleh warga desa yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Oleh karena itu, dalam menjalankan peranannya sebagai seorang kepala desa dalam kehidupan sehari-hari maka faktor keturunan sangat diperhatikan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Toni Hartono selaku

Tokoh agama:

Untuk kepemimpinan Kepala Desa Suka Jaya yang selama ini saya rasakan tidak dipengaruhi oleh tekanan (ya ini saya rasakan) walaupun nanti orang lain mengatakan (mengatakan) yang lain itu haknya mereka. Saya mengatakan sesuai apa yang saya rasakan (itu saja) karena sudah saya sampaikan (tadi). Jadi yang saya rasakan kepala desa sudah cukup arif menanggapi segala masalah yang ada. (Nah.... tapi kan) memang manusia (ini kan) tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dilakukan kepemimpinan (kita gitu). Jadi menurut pribadi saya, saya tidak membawa nama orang-orang, saya bawa

⁸¹ Adisasmita Raharjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.24.

nama pribadi saya bahwa kepemimpinan kepala desa ini (oke) bagus. Saya pribadi dalam memilih seorang pemimpin desa (ya...) dan saya rasa sebahagian besar masyarakat sangat memperhatikan keturunannya. Karena menurut saya selain melihat agamanya kita juga melihat gimana keturunannya.⁸²

Menurut Bapak Toni Hartono bahwa salah satu faktor penunjang dalam pemberdayaan selain faktor agamanya juga dilihat dari faktor keturunannya. Walaupun masyarakat desa sudah mengalami pergeseran budaya dan kultur, namun ada nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang masih sangat dijaga oleh warga desa yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Sementara itu islam memandang keturunan sebagai salah satu kreteria seorang pemimpin, Sesuai dengan hadis dibawah ini.

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَلَكُمْ مِنْهُ ذَلِكَ

Pemimpin itu dari Quraisy. Mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan, kalian juga demikian... (HR. Ahmad 12900 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Hadis di atas menyatakan bahwa para pemimpin lazimnya berasal dari keturunan Quraisy. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan al-Bayhaqi yang bersumber dari sahabat Anas ibn Malik. Berdasarkan hadis tersebut, ulama sepakat bahwa salah satu prasyarat kepala negara adalah berasal dari keturunan Quraisy. Pandangan ini didukung mayoritas ulama,

⁸² Wawancara bersama Bapak Toni Hartono, Tokoh Agama, Desa Suka Jaya, 18 Februari 2019

seperti al-Mawardi (w. 450 H), al-Juwayni (w. 478 H) dan pemikir Muslim kontemporer seperti Rasyid Ridha sebagaimana dikutip dari karyanya, *al-Khilafah*.

Literatur sejarah menyebutkan, mulanya suku Jazirah Arab dikenal sebagai kaum nomaden yang tidak memiliki wilayah kekuasaan khusus. Karenanya, penaklukan dan invasi antar suku lazim terjadi. Suatu wilayah kekuasaan pada akhirnya terbentuk atas kerjasama dan kesepakatan antar suku yang menetap di wilayah tersebut. Untuk menghindari terjadinya penaklukan dari suku lain, diperlukan suatu kerjasama politik yang lazim dipegang suku terkuat dan yang paling dihormati. Di sinilah Quraisy memainkan peran penting dalam kontestasi perpolitikan masyarakat Arab primitif. Khalil Abdul Karim (1997) menilai, Quraisy memiliki akar sejarah panjang sebagai suku paling berpengaruh yang memiliki keberanian dan kepemimpinan politik dalam penaklukan wilayah sejak pertama kali didirikan oleh Qushay bin Kilab (w. 480 M) yang kemudian diteruskan oleh keturunannya, Abdu Manaf dan Abdul Muthalib.⁸³

⁸³ Muhammad Sopi Mubarak, *"Memahami Hadis Pemimpin dari Bangsa Qurays,"* <http://www.memahami.com> (4 agustus 2019), h.3

Dengan demikian, Ibn Khaldun mengungkapkan bahwa sangat logis jika nabi menginformasikan bahwa kepemimpinan harus berasal dari kaum Quraisy untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman dan kekacauan (*raf'u al-tanazu*). Ibn Khaldun mendasari pemikirannya pada konsep penaklukan (*conquest*) yang menginspirasi dibentuknya teori konflik sebagai satu dari dua teori berdirinya negara. Bagi Ibn Khaldun, kekuasaan semata-mata dibentuk untuk melindungi wilayah teritorial dari ancaman bangsa lain.⁸⁴

Persyaratan pemimpin yang berasal keturunan Quraisy hanya berlaku sebagai kriteria tambahan bukan syarat utama seperti dikemukakan Ibn Khaldun dan mayoritas ulama. Karena penyelenggaraan negara menyangkut kepentingan umum, kriteria-kriteria utama seperti mampu bersikap adil, amanah, dan berwawasan luas harus didahulukan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa keturunan merupakan faktor terpenting dalam kepemimpinan, Meskipun hadis tersebut menceritakan tentang keturunan Quraisy. Dan pengaplikasiannya pada saat sekarangpun faktor keturunan merupakan hal terpenting dalam memilih seorang pemimpin.

⁸⁴ Muhammad Sopi Mubarak, *Memahami Hadis Pemimpin dari Bangsa Qurays*, Jurnal islami.co/bagaimana-cara-memahami-hadis-pemimpin-mesti-dari-suku-quraisy/, 2019

Kedua, kewibawaan. Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka kepala desa haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa. Kewibawaan adalah kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.⁸⁵

Kepala desa dalam mengambil sebuah kebijakan, ia juga melihat dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga keputusan yang dia ambil pun bijaksana demi terwujudnya tujuan bersama maka secara tidak langsung kewibawaan tersebut akan terpancar dalam diri seorang pemimpin tersebut. Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat, tetapi dapat juga bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah.

⁸⁵ Usman Suyanto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.52

Jadi, apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin.

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Suka Jaya, Bapak Turiadi mengungkapkan tentang hubungan antara kepala desa dengan masyarakatnya:

Ya selama ini (ya.....) baik-baik saja (buk), kepala desa itu seorang pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyatnya. Dia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah terhadap masyarakatnya, dekat dengan pemuda-pemuda desa. tapi kedekatan dan keakraban dengan masyarakatnya tidak berarti beliau kehilangan wibawa.⁸⁶

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Rusli selaku tokoh agama mengenai hubungan kepala desa dengan masyarakatnya:

“(Wah) sangat baik, untuk arahannya (segala macamnya), (segala macam) pribadinya sama masyarakat cukup baik dan saya rasa kepala desa sangat-sangat berwibawa”.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara bersama dengan Bapak Turiadi, Tokoh Masyarakat, Desa Suka Jaya, 19 Februari 2019.

⁸⁷ Wawancara bersama dengan Bapak Rusli, Tokoh Agama, Desa Suka Jaya, 19 Februari 2019.

Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka kepala desa haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa kepada masyarakat.

Kewibawaan dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya. Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat, tetapi dapat juga bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin.⁸⁸

⁸⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama), h.65

Rasulullah SAW adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, tidak ada satu riwayat pun, yang shahih bahwa beliau pernah berdusta, ingkar janji atau menyalah-menyalahkan amanah. Kharijah ibn Zaid berkata, Nabi adalah manusia yang paling berwibawa. Saat di majelis, beliau hampir tak mengeluarkan apapun dari mulut dan hidungnya (maksudnya mengeluarkan sesuatu yang merendahkan wibawa dan kehormatannya) (HR Abu Daud).

Ali ibn Abi Thalib melukiskan kewibawaan Nabi di mata orang yang bertemu dengan beliau pertama kali. Katanya, “Siapa yang bertatap muka dengan Nabi, ia akan bergetar karena kewibawaan beliau.” Wibawa Nabi dari keagungan, bukan karena kekuasaan atau kekuatan yang membuat takut orang lain. Karena itu Ali menambahkan, “Siapa bergaul dan mengenal betul beliau, ia akan mencintai beliau” (HR Abu Daud).

Kewibawaan Nabi dengan banyak diam, beliau tidak berbicara jika tidak perlu. Berpaling jika orang berbicara tidak baik, tawanya sebatas senyuman, jika senyumnya lebar beliau menutup mulutnya, berbicara secukupnya tak kurang tak lebih. Sahabat juga begitu, tertawa sebatas senyuman, terutama saat dihadapan Nabi. Bukan hanya sebagai sikap takzim, tetapi mereka berusaha meneladani beliau. Majelis beliau adalah majelis kebajikan, amanah dan

menjaga malu. Jika beliau berbicara, semua orang yang duduk merunduk, seolah di atas kepala mereka ada burung lewat (HR Ahmad).

Jadi kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.

Ketiga, kekuasaan. Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas (keadaan), dan otoritas (kekuasaan) yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain.

Adapun beberapa sumber-sumber kekuasaan menurut Harbani Pasolong ada empat yaitu kekuasaan menghargai, kekuasaan sah, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan rujukan yang akan dijelaskan sebagai berikut.⁸⁹ Pertama, kekuasaan menghargai, adalah kekuasaan yang diperoleh dari fakta bahwa

⁸⁹ Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h.107

seseorang dikenal sebagai pemberi pengaruh, mempunyai kemampuan untuk memberi imbalan orang lain, dikenal sebagai orang yang dipengaruhi, untuk melaksanakan perintah, yang mungkin dinyatakan atau tersirat. Kedua, kekuasaan sah atau kekuasaan formal adalah kekuasaan yang ada ketika seorang bawahan atau orang yang dipengaruhi mengakui bahwa pemberi pengaruh “berhak” atau secara hukum boleh menggunakan pengaruh dalam kaitan tertentu. Ketiga, kekuasaan keahlian adalah berdasarkan pada keyakinan atau pengertian bahwa pemberi pengaruh mempunyai pengetahuan spesifik atau kepekaan relevan yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Keempat, kekuasaan rujukan adalah kekuasaan berdasarkan pada keinginan dari orang yang mempengaruhi untuk menjadi seperti atau menyamakan dirinya dengan pemberi pengaruh. Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain.

Seorang khalifah atau pemimpin secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadits.

Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu akan meminta pertanggungjawaban yang bersifat ganda.⁹⁰ Pertanggungjawaban kepada Allah dihari kemudian, dan pertanggungjawaban kepada manusia di dunia. Allah Swt. berfirman:

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Ali Imran [3]: 26).

Ayat di atas memberikan isyarat yang jelas sekaligus memberi pelajaran kepada kita bahwa kerajaan atau kekuasaan merupakan hak prerogatif Allah Swt., sehingga siapa pun yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kekuasaan, pastilah ia akan memperolehnya, sebaliknya siapa pun yang dikehendaki oleh Allah tidak mendapatkan kekuasaan, pastilah ia tidak akan memperolehnya, meskipun ia sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai daya dan upayanya.

Namun demikian, harus dipahami pula bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang tidak serta merta Allah memberikan berkah dan rido-Nya berupa kemuliaan-kemuliaan kepadanya. Artinya, orang yang

⁹⁰ Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Bina Ilmu, Cetakan Pertama: Surabaya, 1995). h. 173.

diberikan kekuasaan tertentu oleh Allah bukanlah orang yang pasti bernilai tinggi di mata Allah sehingga ia akan memperoleh berbagai kemuliaan dari kekuasaannya. Karena itu, tidak sedikit orang yang mendapatkan kekuasaan dan berkuasa dalam waktu yang cukup lama, bahkan memperoleh dukungan rakyat secara mayoritas, berujung pada kenistaan dan penderitaan. Misalnya, di zaman dulu kita semua mengenal bagaimana Fir'aun, Namrud, Hitler, dan yang lainnya atau beberapa pemimpin dunia modern seperti Ferdinand Marcos, Polpot, Saddam Husein, Muammar Khadafi, dan Hosni Mubarak, di akhir kekuasaan mereka bukan kemuliaan yang mereka peroleh, tetapi justru kehinaan dan kenistaan.

Di sisi lain, kekuasaan yang diberikan Allah kepada seseorang bisa juga akan membawa pada ketinggian dan kemuliaan derajatnya di mata rakyat dan di hadapan Allah sekaligus, seperti yang dialami oleh para Nabi dan Rasul Allah serta para Khulafaur Rasyidin (para pemimpin di zaman kekhalifahan yang mendapatkan berbagai kemuliaan). Mereka benar-benar mendapatkan kekuasaan sekaligus memperoleh rahmat dan rido Allah serta kemuliaan di mata manusia. Kekuasaan seperti ini biasanya menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah dan juga dekat dengan rakyatnya, serta selalu tunduk pada kekuasaan-Nya. Ia melaksanakan kekuasaannya secara adil dan memberikan

kemaslahatan yang banyak bagi rakyatnya. Ia menyintai rakyatnya dan juga dicintai oleh rakyatnya. Kekuasaan seperti inilah yang akhirnya akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan tentu akhirnya memperoleh derajat tinggi di hadapan Allah kelak di akhirat.⁹¹

Kekuasaan di dalam Islam adalah tanggung jawab. Kekuasaan tidaklah diberikan kepada seseorang melainkan untuk mewujudkan tujuan. Tercapainya tujuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara rakyat dan penguasa.

Maksud dan tujuan setiap kekuasaan di dalam Islam adalah agar agama ini menjadi milik Allah, kalimat Allah menjadi yang tertinggi dan ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk untuk beribadah semata kepada-Nya. Karena tujuan itulah Allah menurunkan wahyu, mengutus Rasul dan karena alasan itu juga Rasul dan orang-orang beriman melakukan jihad.

Adapun faktor penghambat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa Suka Jaya ada dua yaitu kondisi penduduk, dan partisipasi masyarakat, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

⁹¹ Marzuki, *Arti Kekuasaan Dalam Islam*, Jurnal.uinalauddin.ac.id 2016, h.8

Pertama, kondisi penduduk. Kondisi-kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Dihilah lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu.⁹²

Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang relatif tertutup, mempunyai keterkaitan dengan alam yang tinggi, memperoleh pelayanan sosial yang sangat minim sehingga menghasilkan tingkat kualitas SDM yang relatif sangat rendah. Untuk itu seorang pemimpin haruslah memahami kondisi penduduk agar dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan pemimpin adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan

⁹² Todaro, *Pembangunan Ekonomi, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 43.

yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutian masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsur-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.⁹³

Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.⁹⁴

Kedua, partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuhkembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat

⁹³ M. Tahir Kasnawi dan Ramli AT, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, (Jakarta: Universitas Tebuka, 2009), h. 31.

⁹⁴ Adisasmita Raharjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.30

menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang.⁹⁵

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Suka Jaya, ia mengatakan:

Salah satu kendala yang saya hadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal pemberdayaan kan pelaku dan tujuannya untuk masyarakat sehingga menjadi tantangan sendiri buat saya. Namun saya berusaha keras dengan mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui bincang-bincang dan selalu ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Karena kelancaran proses pemberdayaan akan berjalan jika masyarakat ikut turut aktif dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, h.34.

⁹⁶ Wawancara bersama Kepala Desa. Suka Jaya, Tanggal 18 Februari 2019.

Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat, Bapak Supriadi.

mengatakan:

Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kepala desa, hal ini karena warga desa cenderung tidak peduli dan lebih sibuk bekerja, sehingga mereka kurang tertarik dengan urusan pemerintahan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat.⁹⁷

Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuhkan kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Masyarakat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk

⁹⁷ Wawancara bersama Bapak Supriadi, Tokoh Masyarakat, Desa Suka Jaya, 18 Februari 2019.

menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang.⁹⁸

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.⁹⁹ Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona dalam penyediaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan masyarakat.¹⁰⁰

Pada zaman Rasulullah masyarakat sudah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi Negara dan nilai-nilai peradaban sebagai bentuk masyarakat yang ideal. Pada saat itu tatanan sosial yang baik, berasal pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu

⁹⁸ Mifta Thoha, *Biroktasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, (Yogyakarta: Rajagrafindo, 2008), h. 15

⁹⁹ Agus Purbathin Hadi, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), 2009.

¹⁰⁰ Aziz Muslim, *Pendekatan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, jurnal aplikasi ilmu-ilmu agama vol VIII, No.2. 2007.

dengan hak dan kewajiban sosial. Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.¹⁰¹ Maka partisipasi sudah ditanamkan dengan baik pada masyarakat muslim di zaman Rasulullah dan berdampak sangat baik dalam keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu.

¹⁰¹ Syahrin Harahap, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya:1999), h.132

BAB V

PENUTUP

Pada bab lima ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran, yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa Suka Jaya selama priode kepemimpinannya sudah berjalan, namun tidak semuanya berhasil. Program pemberdayaan yang berjalan yaitu MTQ dan olahraga yang sudah berjalan setiap tahunnya, dan karna pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas olahraga. Sementara program pemberdayaan yang belum berjalan ialah pelatihan jahit menjahit dan pelatihan ternak sapi, karena kurang partisipasi masyarakat desa.

Adapun faktor penunjang meliputi keturunan, kewibawaan dan kekuasaan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi penduduk dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Sebagai akhir dari skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan untuk kepala desa agar pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lebih dioptimalkan lagi, supaya masyarakat desa Suka Jaya semakin berkembang dan ekonominya meningkat. Kepala desa juga harus meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai objek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
2. Disarankan untuk masyarakat desa Suka Jaya agar ikut serta dan berpartisipasi secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa.
3. Disarankan untuk fakultas supaya digalakkan lagi penelitian lapangan yang dibuat untuk kontribusi antara pihak fakultas dan pemerintah desa dan pihak fakultas dimohonkan untuk dibantu dan dimudahkan segala urusan yang ada.
4. Kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat melanjutkan penulisan ini, dengan kasus yang berbeda atau di tempat yang berbeda karena penulis

menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan serta dapat memberikan masukan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Muhammad Rusdi, 2000, *politik islam*, (Yogyakarta: PT.Harun,pim dan Yasat)

Al-Mawardi, 2000, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri(Jakarta: Darul Falah)

Arifin M, 1997, *Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama*, CV Toha Putra, Semarang)

Ashshofa Burhan, 2012, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Reneka Cipta)

Harahap Syahrin, 1999, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya)

Himawan Muammar, 2004 *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu)

Indrajit VO Wisnu dan Soimin, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Jakarta:Intrans Publisng)

Kamaruzzaman, 2001, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang: Indonesiatara)

Kasnawi M. Tahir dan Ramli AT, 2009, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, (Jakarta: Universitas Tebuka)

- Kartono Kartini, 1998, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)Kartasasmita
- GINANJAR, 1995, *Pembangunan untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Cides)
- Kertasasmita GINANJAR, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta)
- Koentjaraningrat, 2010, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Mardikanto Totok, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: ALFABETA)
- Mardikanto Totok, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: ALFABETA)
- M. Echols John dan Hassan Shadily, 1976, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT gramedia Jakarta)
- Munawwir Ahmad Warson, 1984, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t.p)
- Pasolong Harbani, 2001, *Kepemimpinan Birokrasi*, (Jakarta: Gramedi)
- Qodir Djaelani Abdul, 1995, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Bina Ilmu, Cetakan Pertama: Surabaya)
- Rahman Taufiq, 1999, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Raharjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Rais M. Dhiauddin, 2001, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press)

Salim Abd Muis, *Fiqh Siyasah Konsep kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*,
(Jakarta :PT. Rajawali Grafindo Persada).

Saparin Sumber, 1979, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan
Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas
Indonesia)

Sumodinigrat Gunawan, 2000, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama)

Sulistiyani Teguh dan Rosidah, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,
(Yogyakarta:Graha Ilmu)

Surianingrat Bayu, 1995, *Pemerintahan Adminitrasi Desa dan Kelurahan*,
(Bandung:PT Remaja Rosdakary).

Suharto Edi, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,
(Bandung: PT Refika Aditama)

Suharto Edi, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Aosial Spektrum
Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Lembaga Studi Pembangunan STKS)

Tantan Hermansyah Muhtadi, 2009, *Manajemen Pengembangan Masyarakat
Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press)

Thoha Mifta, 2008, *Biroktasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*,

(Yogyakarta: Rajagrafindo)

Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B)

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka)

Todaro, 2005, *Pembangunan Ekonomi, Jilid 2*, (Jakarta)

Ukas Maman, 1999, *Manajemen Konsep, Prinsip, dan*, (Bandung : Ossa Promo)

Usman Suyanto, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Wasistiona Sadu, Irwan Tahir, 2007, *Adminitrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta:

Universitas Terbuka)

Internet

Abdul Rauf, *“Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*

(P3MD) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi,” <http://www.scribd.com> (27 Juni 2019)

Agus Purbathin Hadi, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan*

Dalam Pembangunan, Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan

Masyarakat Agrikarya (PPMA), 2009.

Muslim Aziz, 2007, *Pendekatan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*,

jurnal aplikasi ilmu-ilmu agama vol VIII, No.2. 2007.

Mohammad Anshor, *“Pengembangan Masyarakat Islam,”*

<http://anshorfazafauzan.com> (27 Juni 2019)

Muhammad Sopi Mubarak, *Memahami Hadis Pemimpin dari Bangsa Qurays*,

Jurnal islami.co/bagaimana-cara-memahami-hadis-pemimpin-mesti-dari-

suku-quraisy/, 2019

Marzuki, *Arti Kekuasaan Dalam Islam*, Jurnal.uinalauddin.ac.id 2016

Pnpm Besitang Langkat, *“Desa itu Bernama desa suka jaya”*,

<http://www.pnpmbesitanglangkat.wordpress.com> (26 April 2019).

Suwani, 2016, *“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa*

Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur,” Istilah:

Jurnal Fisip, Adminitrasi Negara

Tatang Suhenndra, *“Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Desa,” <http://www.academia.edu> (29 Juni 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Kantor Desa Suka Jaya

Foto bersama bapak Tugino Kepala desa Suka Jaya



Foto bersama Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat desa Suka Jaya



Foto bersama bapak jhoni samosir kepala dusun V



Foto bersama bapak Kadri kepala dusun II



Foto bersama bapak Ruddin Sigito Kepala Dusun IV



Foto bersama bapak Budiono Tokoh Masyarakat Desa Suka Jaya



Foto bersama bapak Supriadi Tokoh Masyarakat Desa Suka Jaya



Foto bersama bapak Turiadi Tokoh Masyarakat Desa Suka Jaya



Foto bersama bapak Rusli Tokoh Agama Desa Suka Jaya



Foto bersama bapak Toni Hartono Tokoh Masyarakat Desa Suka Jaya



Foto bersama bapak NgadiranToko Agama Desa Suka Jaya

LAPORAN KEPENDUDUKAN

DESA : SUKA JAYA
KECAMATAN : BESITANG
BULAN : April
TAHUN : 2018

WNI PRIBUMI : KK

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	PENDUDUK AWAL BULAN INI			LAHIR BULAN INI			MATI BULAN INI			PENDATANG BULAN INI			PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
01	Dusun I Sukatani	146	274	263	537	2	1	3	1	0	1	3	2	5	0	3	3	278	263	541
02	Dusun II Harumsari	68	129	111	240	1	0	1	0	0	0	2	1	3	1	0	1	131	112	243
03	Dusun III Sukamulia	178	302	262	564	3	2	5	2	1	3	4	5	9	1	2	3	306	266	572
04	Dusun IV Sukamaju	38	78	93	171	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	79	94	173
05	Dusun V Tungkam Jaya	126	213	206	419	3	1	4	1	0	1	2	1	3	1	1	2	216	207	423
	JUMLAH	556	996	935	1.931	10	6	16	4	2	6	11	9	20	3	6	9	1.010	942	1.952

Suka Jaya, 30 April 2018
Kepala Desa Suka Jaya,
TUGINO

